

# KEK

Vol 14 No 1

Tahun 2010

## KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

- **Indonesia Dalam Menghadapi Liberalisasi Bidang Jasa Pada Tahun 2010**
- **Factors Affecting Finance Companies**
- **Analisis Butterfly Strategy Dalam Portofolio Surat Utang Negara di Perdagangan Pasar Sekunder**
- **Pengaruh Program Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap APK Wajar : 2006- 2008**
- **Analisis Potensi Pendapatan Dari Mekanisme REDD Sektor Kehutanan di Indonesia**
- **Analisis Sektor-Sektor Unggulan Dalam Menggerakkan Sektor Riil**

Kaj. Eko. & Keu.	Vol. 14	No. 1	Jakarta 2010	ISSN 1410-3249	Terakreditasi C (No. Akreditasi : 233/AU1/P2MBI/08/2009)
------------------	---------	-------	--------------	----------------	--

**Pusat Kebijakan Ekonomi Makro  
Badan Kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan  
Republik Indonesia**

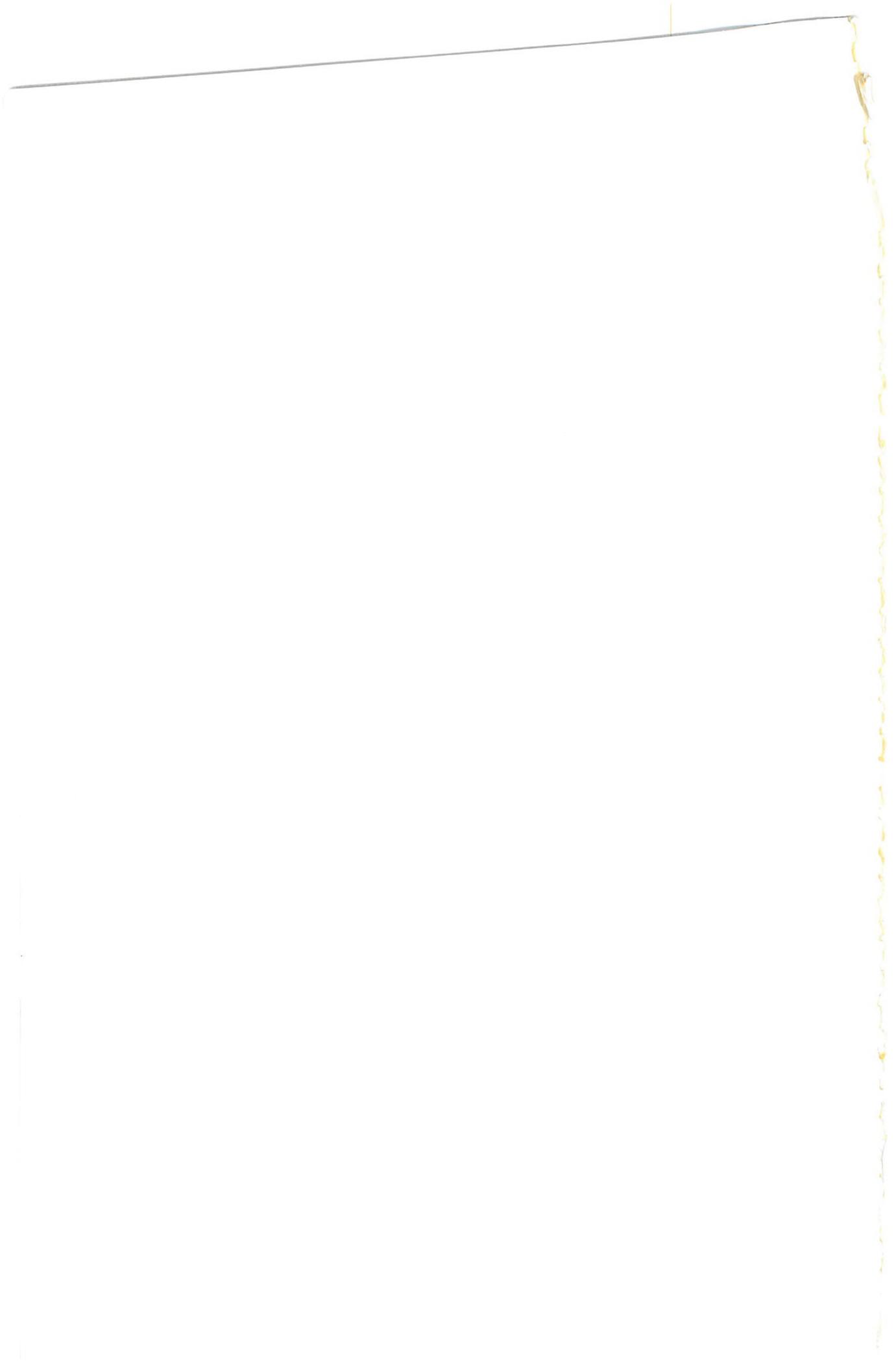
# KAJIAN

## EKONOMI KEUANGAN



Pusat Kebijakan Ekonomi Makro  
Badan Kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan RI

- Indonesia Dalam Menghadapi Liberalisasi Bidang Jasa Pada Tahun 2010
- Factors Affecting Finance Companies
- Analisis Butterfly Strategy Dalam Portofolio Surat Utang Negara di Perdagangan Pasar Sekunder
- Pengaruh Program Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap APK Wajar : 2006-2008
- Analisis Potensi Pendapatan Dari Mekanisme REDD Sektor Kehutanan di Indonesia
- Analisis Sektor-Sektor Unggulan Dalam Menggerakkan Sektor Riil



## KATA SAMBUTAN

Kami panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Kajian Ekonomi dan Keuangan edisi ini ke hadapan pembaca sekalian. Pada edisi ini, kami menyajikan berbagai topik yang berkaitan dengan analisis dan dampak kebijakan publik di bidang ekonomi dan keuangan negara.

Kajian pada volume kali ini diisi oleh berbagai topik tulisan yaitu Indonesia Dalam Menghadapi Liberalisasi Bidang Jasa Pada Tahun 2010; *Factors Affecting Finance Companies*; Analisis *Butterfly Strategy* Dalam Portofolio Surat Utang Negara di Perdagangan Pasar Sekunder; Pengaruh Program Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap APK Wajar : 2006-2008; Analisis Potensi Pendapatan Dari Mekanisme REDD Sektor Kehutanan di Indonesia; dan Analisis Sektor-sektor Unggulan Dalam Menggerakkan Sektor Riil. Adapun para penulis yang berkontribusi pada penerbitan kali ini yaitu R. Nurhidajat, YooPi Abimanyu, Mohamad Nasir, Abdul Aziz, Adrianus Dwi Siswanto, dan Arti Dyah Woroutami.

Demikianlah kata pengantar yang dapat kami sampaikan. Ibarat peribahasa tiada gading yang tak retak, maka kami menyadari kajian ini tentunya masih terdapat kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari para pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca sekalian. Selamat membaca!

Jakarta, 2010  
Dewan Redaksi



## DAFTAR ISI

Cover	
Dewan Redaksi .....	ii
Kata Sambutan .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	viii
Kumpulan Abstraksi .....	xi
<b>INDONESIA DALAM MENGHADAPI LIBERALISASI BIDANG JASA PADA TAHUN 2010</b>	
Oleh: R. Nurhidayat .....	1
<b>FACTORS AFFECTING FINANCE COMPANIES</b>	
Oleh: Yoopi Abimanyu .....	17
<b>ANALISIS BUTTERFLY STRATEGY DALAM PORTOFOLIO SURAT UTANG NEGARA DI PERDAGANGAN PASAR SEKUNDER</b>	
Oleh: Mohamad Nasir .....	27
<b>PENGARUH PROGRAM PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN TERHADAP APK WAJAR: 2006-2008</b>	
Oleh: Abdul Aziz .....	53
<b>ANALISIS POTENSI PENDAPATAN DARI MEKANISME REDD SEKTOR KEHUTANAN DI INDONESIA</b>	
Oleh: Adrianus Dwi Siswanto .....	101
<b>ANALISIS SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN DALAM MENGGERAKKAN SEKTOR RIIL</b>	
Oleh: Arti Dyah Woroutami .....	123

## DAFTAR TABEL

### INDONESIA DALAM MENGHADAPI LIBERALISASI BIDANG JASA PADA TAHUN 2010

Tabel 1.1	Contoh Empat Moda Pemasokan Jasa .....	4
Tabel 1.2	PDB ASEAN DALAM PPP .....	6
Tabel 2.1	Jumlah Penumpang Yang Memanfaatkan Transportasi Udara Penerbangan ke Luar Negeri di Indonesia Tahun 2000 – 2005 .....	11
Tabel 2.2	Tourism Impact Index (TII) .....	13
Tabel 2.3	Tourism Participation Index (TPI) .....	13

### FACTORS AFFECTING FINANCE COMPANIES

Tabel 2.1	Contribution of Non Bank Financial Institution in GDP .....	18
Tabel 2.2	Finance Companies Activities .....	18
Tabel 2.3	Phillips-Perron Unit Root Tests (Observations = 41 ) .....	20

### ANALISIS *BUTTERFLY STRATEGY* DALAM PORTOFOLIO SURAT UTANG NEGARA DI PERDAGANGAN PASAR SEKUNDER

Tabel 1.1	Uraian SUN Berkupon Bunga Tetap .....	29
Tabel 3.1	Perkembangan SBN <i>Tradable</i> .....	39
Tabel 4.1	Hasil Perhitungan Duration (Years) .....	41
Tabel 4.2	Ringkasan Hasil Analisis .....	51

### PENGARUH PROGRAM PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN TERHADAP APK WAJAR: 2006-2008

Tabel 2.1	Jenjang Pendidikan dan Kelompok Usia .....	68
Tabel 3.1	Target Siswa dan Alokasi Pagu Anggaran BOS T.A 2005-2009 .....	69
Tabel 3.2	Biaya Satuan BOS Tahun Anggaran 2005 s.d. 2008 .....	70
Tabel 4.1	Hasil Estimasi Final Model FEM: Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen (APK) .....	73
Tabel 4.2	<i>Correlation Matrix</i> 4 Variabel Independen .....	75
Tabel 4.3	Target dan Realisasi Siswa Penerima BOS Tahun 2008 (Pada Sekolah Sampel di 12 Propinsi) .....	80
Tabel 4.4	Kontribusi Masing-Masing Variabel Terhadap APK Per Propinsi Tahun 2007-2008 .....	88

### ANALISIS POTENSI PENDAPATAN DARI MEKANISME REDD SEKTOR KEHUTANAN DI INDONESIA

Tabel 1.1	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku .....	102
Tabel 4.1	Deforestasi Di Indonesia .....	113
Tabel 4.2	Estimasi Kerusakan ( <i>Baseline</i> ) BAU (Hektar) .....	114
Tabel 4.3	Perkembangan Penurunan Deforestasi 3 Skenario .....	116
Tabel 4.4	Perkembangan Emisi Yang Dihasilkan Era Penerapan REDD .....	117
Tabel 4.5	Estimasi Peningkatan Stok Karbon .....	118
Tabel 4.6	Potensi Pendapatan Penjualan Karbon .....	119

**ANALISIS SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN DALAM  
MENGGERAKKAN SEKTOR RIIL**

Tabel 4.1	Rata-rata Sebaran Pertumbuhan dan Distribusi PDB Tahun 2000-2008 Menurut Sektor .....	131
Tabel 4.2	Sebaran Pertumbuhan dan Distribusi PDB Tahun 2009 Menurut Sektor .....	133
Tabel 4.3	Analisis Perkembangan Sektor Unggulan Pengahela Perekonomian Tahun 2000 .....	137
Tabel 4.4	Analisis Perkembangan Sektor Unggulan Pengahela Perekonomian Tahun 2003 .....	137
Tabel 4.5	Analisis Perkembangan Sektor Unggulan Pengahela Perekonomian Tahun 2005 .....	138
Tabel 4.6	Analisis Perkembangan Sektor Unggulan Pengahela Perekonomian Tahun 2000 .....	139
Tabel 4.7	Analisis Perkembangan Sektor Unggulan Pengahela Perekonomian Tahun 2003 .....	140
Tabel 4.8	Analisis Perkembangan Sektor Unggulan Pengahela Perekonomian Tahun 2005 .....	140

## DAFTAR GAMBAR

### INDONESIA DALAM MENGHADAPI LIBERALISASI BIDANG JASA PADA TAHUN 2010

Diagram 1.1	Persentase Jasa Terhadap GDP Tahun 2008 Pada Negara-Negara ASEAN .....	7
Diagram 1.2	Ekspor Jasa ASEAN 2007 .....	8
Diagram 1.3	Impor Jasa ASEAN 2007 .....	8

### FACTORS AFFECTING FINANCE COMPANIES

Grafik 2.1	Comparison Between Log Total Financing and Log Exchange Rate .....	21
Grafik 2.2	Comparison Between First Difference of Log Total Financing and First Difference of Log Exchange Rate .....	22

### ANALISIS *BUTTERFLY STRATEGY* DALAM PORTOFOLIO SURAT UTANG NEGARA DI PERDAGANGAN PASAR SEKUNDER

Grafik 2.1	Harga dan <i>Yield</i> Obligasi .....	32
Grafik 2.2	Normal <i>Yield Curve</i> .....	33
Grafik 2.3	<i>R Inverted Yield Curve</i> .....	34
Grafik 2.4	<i>Humped Yield Curve</i> .....	35
Grafik 2.5	<i>Flat Yield Curve</i> .....	35
Gambar 2.6	<i>Immunization – Cash Flow Matching Concept</i> .....	37
Grafik 3.1	Perkembangan Pinjaman Pemerintah .....	39
Grafik 3.2	Perbandingan <i>Yield</i> Obligasi Negara .....	40
Grafik 4.1	Probabilitas <i>Pay Off</i> .....	45
Grafik 4.2	Laba (Rugi) Portofolio .....	46
Grafik 4.3	Perkembangan harga FR 21, 26 dan 34 .....	46
Grafik 4.4	Frekuensi Kejadian .....	47
Grafik 4.5	Profit Portofolio .....	48
Grafik 4.6	Perkembangan Harga .....	48
Grafik 4.7	Profit Perkembangan Harga .....	49
Grafik 4.8	Profit Portofolio .....	50
Grafik 4.9	Frekuensi Kejadian .....	50

### PENGARUH PROGRAM PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN TERHADAP APK WAJAR: 2006-2008

Gambar 2.1	Pengaruh Kebijakan Subsidi Terhadap Permintaan Pendidikan .....	67
Gambar 4.1	Pendapat Respon Tentang Ada Tidaknya Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) Setelah Adanya Program BOS .....	77
Gambar 4.2	Pendapat Respon Tentang Ada Tidaknya Pungutan Ketika Mencairkan Dana BOS .....	78
Gambar 4.3	Pendapat Respon Tentang Manfaat Program BOS Dalam Mengurangi Jumlah Anak Putus Sekolah .....	80
Gambar 4.4	Pendapat Respon Tentang Manfaat Yang Paling Dominan Dari Program BOS.....	81

**ANALISIS POTENSI PENDAPATAN DARI MEKANISME REDD  
SEKTOR KEHUTANAN DI INDONESIA**

Gambar 3.1 Potensi Kredit Karbon di Indonesia .....	109
Gambar 3.2 Pendekatan Perhitungan Emisi <i>Gross</i> dan <i>Net</i> .....	110

---

**MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**

ISSN 1410-3249

KEK Terakreditasi C

No. Akreditasi : 233/AU1/P2MBI/08/2009

Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010

*Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.*

**ABSTRAKSI**

**Nurhidajat, R, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)  
Indonesia Dalam Menghadapi Liberalisasi Bidang Jasa Pada Tahun 2010  
Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010, halaman  
1-16**

*This is a paper aiming to capture Indonesia's position with regard implementation of Vientiane Action Programme (VAP) mainly in services sector. According to the programe, there are four services sector that will be applied in 2010 which are air travel, information and comunication technology, healthcare, and tourism. A description analysis is used to describe the services sector in both ASEAN and domestic scope. The findings suggest that tourism is one of the sectors which need more atention. Compared with the others, This sector has the biggest share of GDP and national employment. Finally, services liberalization should be applied gardually to minimised negative impact of liberalization..*

*Key words: Vientiane Action Programme, services, liberalization. ASEAN*

**Abimanyu, Yoopi, et. al. (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan)**

**Factors Affecting Finance Companies**

**Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010, halaman  
17 - 26**

*Perusahaan pembiayaan sebagai salah satu bentuk dari lembaga keuangan dipengaruhi oleh gerakan dari variabel moneter, yakni antara lain nilai tukar dan tingkat bunga pinjaman. Hipotesa dari tulisan singkat ini adalah bahwa kedua variabel moneter tersebut mampu mempengaruhi kinerja dari perusahaan pembiayaan, baik dari sisi aktiva maupun dari sisi pasiva. Data yang digunakan adalah data bulanan periode Desember 2006 sampai dengan Juni 2009. Analisa yang digunakan adalah pendekatan grafik (visual inspection) dan ekonometri, yakni Johansen Cointegration untuk hubungan jangka panjang dan Granger Causality untuk hubungan jangka pendek. Hasil analisa grafik menunjukkan bahwa dari sisi asset, total pembiayaan (termasuk komponennya yakni pembiayaan melalui consumer finance maupun leasing) tidak converge, baik dengan nilai tukar maupun tingkat bunga pinjaman. Hasil analisa ekonometri Johansen Cointegration juga menunjukkan bahwa total pembiayaan termasuk komponennya tidak memiliki hubungan jangka panjang dengan nilai tukar dan*

**MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**

ISSN 1410-3249

KEK Terakreditasi C

No. Akreditasi : 233/AU1/P2MBI/08/2009

Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010

***Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.***

**ABSTRAKSI**

*tingkat bunga pinjaman. Mereka tidak cointegrated. Analisa jangka pendek dengan menggunakan Granger Causality juga tidak menunjukkan pola keterkaitan antara variabel moneter dan komponen asset dari perusahaan pembiayaan. Dari sisi pasiva, pendekatan grafik ternyata menunjukkan bahwa total pinjaman (dan komponennya, yakni pinjaman dalam negeri dan luar negeri) nampaknya converge dengan nilai tukar maupun tingkat bunga pinjaman. Analisa formal dengan ekonometri menunjukkan bahwa total pinjaman dan komponennya weakly cointegrated dengan nilai tukar dan sepenuhnya cointegrated dengan tingkat bunga pinjaman. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan makroekonomi yang tepat (realisasi kebijakan sama dengan target kebijakan dimana tidak ada over excessive ataupun under excessive macropolicies) yang mampu menghasilkan nilai tukar yang stabil dan tingkat bunga yang relatif rendah, akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan pembiayaan dari sisi pasiva.*

*Kata Kunci : macroeconomics, financing, granger causality tests, exchange rate*

**Nasir, Mohamad , et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)  
Analisis *Butterfly Strategy* Dalam Portofolio Surat Utang Negara di  
Perdagangan Pasar Sekunder**

**Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010, halaman  
27-52**

*Regularly, Government of Indonesia funds its deficit budget by issuing government bond called Surat Utang Negara (SUN). For investors, existing SUN is an opportunity investment to reach return. However, to reach it is not easy, and it needs strategy. The report describes the performance of SUN's portfolio by using butterfly strategy approach. By using sample data and assumptions, those strategies have a good performance for portfolio A B and C. It can be showed by positive pay off resulted by the strategy. Portfolio A that contains SUN FR 21, 26 and 34 can result positive pay off with probability 88.84%, portfolio B can reach 93.41% chance to reach profit and portfolio C can result 74.39% chance..*

*Keywords : Butterfly Strategy, Cash Matching, Macaulay Duration, Modified Duration, Immunization, Surat Utang Negara, Yield*

<p><b>MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN</b>  <b>ISSN 1410-3249</b>  <b>KEK Terakreditasi C</b>  <b>No. Akreditasi : 233/AU1/P2MBI/08/2009</b>  <b>Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010</b></p>
<p><i>Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.</i></p>
<p><b>ABSTRAKSI</b></p>
<p><b>Aziz, Abdul, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)</b>  <b>Pengaruh Program Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap APK Wajar : 2006 – 2008</b>  <b>Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010, halaman 53 - 100</b></p> <p><i>Penelitian ini fokus pada analisis pengaruh program-program pemerintah bidang pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP: 2006 – 2008. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan estimasi Data Panel Model Efek Tetap. Hasil penelitian ini menyarankan keharusan adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam keberhasilan pendidikan nasional dan menyarankan agar ada sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program tersebut sehingga dampak positif dari kebijakan pendidikan yang diterapkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Peneliti ini juga menyarankan agar pemerintah dapat meningkatkan jumlah dana pada program bidang pendidikan ini karena hasil estimasi menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara peningkatan dana dan peningkatan APK.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Pengaruh Program Pemerintah Bidang Pendidikan, APK Wajar</i></p>
<p><b>Siswanto, Adrianus Dwi, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)</b>  <b>Analisis Potensi Pendapatan Dari Mekanisme REDD Sektor Kehutanan di Indonesia</b>  <b>Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010, halaman 101 – 122</b></p> <p><i>Indonesia faces serious problems in the forestry sector. The forest area covers about 70 percent of the total area spread over 33 provinces, have been damaged more than 37 percent on many levels. Department of Forestry reported deforestation reached 1 million hectares per year since 2000. If the condition is not change then the year 2050 the entire forest will be gone.</i></p> <p><i>This study focus to calculate the value of potential income that can be accepted if the REDD mechanism is applied in Indonesia. The methodology used in this study are mathematics and descriptive statistics using secondary data. Source of data are obtained the Central Bureau of Statistics and Ministry of Forestry and other sources.</i></p>

**MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**

ISSN 1410-3249

KEK Terakreditasi C

No. Akreditasi : 233/AU1/P2MBI/08/2009

Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010

*Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.*

**ABSTRAKSI**

*The results showed that according the baseline, the growth trends in deforestation by using 2000 - 2005, Indonesian forest destruction reached 35.277 million hectares on 2017 with 15 percent growth assumption damage.*

*By implementing 3 simulations assuming that the decreased the rate of deforestation by 15 percent, 50 percent and 75 percent, the study provides results that the potential revenue are vary from of U.S. \$ 20.155 million to U.S. \$ 532.530 million. Estimated potential revenue is determined by the ability to decrease the growth rate of deforestation. The higher the ability to decrease the rate of deforestation, the higher the potential for carbon stock is maintained. On the other side encouraging the increasing deforestation of forest produce higher emissions more carbon stock disappear.*

*Keywords: REDD, deforestation, potential revenues, the stock of carbon.*

**Woroutami, Arti Dyah, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)**

**Analisis Sektor-sektor Unggulan Dalam Menggerakkan Sektor Riil**

**Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010, halaman 123 - 142**

*External fluctuation happened on global economy could be anticipated by Indonesia Government through a good coordination between fiscal and monetary policy. It is reflected from the Indonesia's positive economic growth on 2009 which reached 4,5 percent. But Indonesia's economic growth acceleration still retained by the low activity on real sector, so worried about the creation of sustainable economic growth. Regarding that, it needs priority sharpening for sectors which has superiority on motivating the economy.*

*To answer the problem, this article seek to identify business sectors which has superiority within economy and to formulate the policy needed to develop those sectors. The analysis is done by using Input Output table with backward linkage and forward linkage approach. Because of the limited data source, the analysis only from year 2000 until 2005.*

*The output shows that there are 6 (six) sectors which has superiority within economy, that is Chemical Industry, Pesticide Fertilizer Industry, Other Food Industry, Rubber and Pesticide Industry, All-kind of Flour Industry, and Water, Gas and Electricity. For those superior sectors needs to be done a priority program thorough budget spending policy.*

*Keywords: Economic growth, superior sector, backward linkage and forward linkage.*

# ANALISIS SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN DALAM MENGERAKKAN SEKTOR RIIL<sup>1</sup>

Oleh :  
Arti Dyah Woroutami<sup>2</sup>

## **Abstract**

*External fluctuation happened on global economy could be anticipated by Indonesia Government through a good coordination between fiscal and monetary policy. It is reflected from the Indonesia's positive economic growth on 2009 which reached 4,5 percent. But Indonesia's economic growth acceleration still retained by the low activity on real sector, so worried about the creation of sustainable economic growth. Regarding that, it needs priority sharpening for sectors which has superiority on motivating the economy.*

*To answer the problem, this article seek to identify business sectors which has superiority within economy and to formulate the policy needed to develop those sectors. The analysis is done by using Input Output table with backward linkage and forward linkage approach. Because of the limited data source, the analysis only from year 2000 until 2005.*

*The output shows that there are 6 (six) sectors which has superiority within economy, that is Chemical Industry, Pesticide Fertilizer Industry, Other Food Industry, Rubber and Pesticide Industry, All-kind of Flour Industry, and Water, Gas and Electricity. For those superior sectors needs to be done a priority program thorough budget spending policy.*

*Keywords: Economic growth, superior sector, backward linkage and forward linkage.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Stabilitas ekonomi makro setelah krisis ekonomi merupakan agenda pemerintah yang menempati prioritas utama. Melalui berbagai kebijakan konsolidasi baik dari sisi fiskal maupun moneter yang relatif terkoordinasi telah mampu menjaga stabilitas ekonomi makro ke arah yang lebih baik. Gejolak eksternal terkait dengan krisis keuangan yang terjadi di AS sebagai dampak dari *subprime mortgage* dapat diantisipasi Pemerintah sehingga tidak terlalu menimbulkan gejolak internal yang begitu parah. Meskipun kinerja pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2009 mengalami perlambatan yaitu tumbuh 4,5 persen dari

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan hasil penelitian PKEM-BKF pada tahun 2008 yang telah diupdate dengan data terbaru dan ditulis kembali sesuai kondisi terkini.

<sup>2</sup> Peneliti Muda pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan

6,0 persen di tahun 2008 akan tetapi hal ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja perekonomian beberapa negara tetangga yang rata-rata mengalami pertumbuhan minus.

Persoalan yang dirasa masih membelenggu adalah terkait dengan proses akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dirasa masih relatif moderat dibanding dengan negara-negara tetangga yang sebelumnya juga terkena krisis. Relatif moderatnya akselerasi pertumbuhan ekonomi diyakini terkait dengan relatif masih lesunya aktifitas sektor riil. Selain rendahnya penyaluran kredit ke sektor riil, berbagai faktor yang masih menghadang seperti teknologi yang relatif sudah mutlak, daya saing yang relatif rendah, dan *high cost economy* yang masih membelenggu telah menjadi kendala bergerakanya sektor riil.

Relatif masih belum bergerakanya sektor riil cukup mengkhawatirkan bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable*). Hal ini juga terlihat dari masih relatif rendahnya kontribusi sumber-sumber pertumbuhan produktif, yakni investasi dan ekspor dalam pembentukan PDB. Pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir masih ditopang oleh konsumsi masyarakat.

Penajaman prioritas pengembangan sektor-sektor usaha yang unggul dalam arti mempunyai keterkaitan penggerakan (*linkage*) terhadap sektor lain yang cukup tinggi perlu dilakukan oleh pemerintah. Pengetahuan mengenai sektor-sektor unggul berdasarkan kriteria keterkaitan terhadap sektor lain sangatlah penting dalam hal ini untuk kemudian diupayakan langkah-langkah pengembangannya guna lebih menggerakkan sektor riil.

## **1.2. Permasalahan**

Permasalahan utama yang akan dikaji dalam studi ini, yakni:

- 1) Sektor-sektor usaha apa yang memenuhi kategori unggul berdasarkan kriteria keterkaitan penggerakan terhadap sektor-sektor lain;
- 2) Langkah-langkah kebijakan apa saja yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan sektor-sektor unggul di atas.

## **1.3. Tujuan**

Bertolak dari permasalahan-permasalahan di atas, maka tujuan studi ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi sektor-sektor usaha yang unggul dalam perekonomian;
- 2) Merumuskan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pengembangan sektor-sektor unggul tersebut.

#### 1.4. Output

Output yang dihasilkan dari studi ini adalah :

- 1) Sektor-sektor usaha yang unggul dalam perekonomian;
- 2) Kebijakan yang dilakukan dalam rangka pengembangan sektor-sektor unggul tersebut.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Produk Domestik Bruto

Kesempatan kerja dalam perekonomian akan menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat produksi atau pendapatan nasional yang dihasilkan. Pendapatan nasional merupakan total nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktivitas ekonomi di suatu negara selama periode tertentu. Ada dua istilah dalam pencatatan pendapatan nasional yaitu *Gross National Product* (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) dan *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB). PNB memfokuskan pencatatan berdasarkan kewarganegaraan yaitu seluruh nilai tambah yang dihasilkan seluruh warga negara dan perusahaan baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, sedangkan PDB mencatat seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seluruh penduduk di suatu wilayah negara tanpa membedakan apakah warga negara dan perusahaan domestik maupun warga negara dan perusahaan asing. Menurut pendekatan produksi, Produk Domestik Bruto ( PDB ) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun (Dumairy, 1990).

### 2.2. Metode Perhitungan

Perhitungan PDB meliputi tiga metode yaitu (1) metode produksi, (2) metode penggunaan, dan (3) metode pendapatan. Metode produksi juga dikenal dengan metode nilai tambah memperhitungkan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh semua sektor-sektor ekonomi dalam suatu negara. Di Indonesia metode ini mencakup nilai tambah 9 sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, dan sektor jasa-jasa.

Metode penggunaan juga disebut sebagai metode pengeluaran, metode ini mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan dalam suatu negara yang dikenal dengan formulasi :

$$Y = C + G + I + X - M$$

dimana :

- C = pengeluaran konsumsi masyarakat  
G = pengeluaran konsumsi pemerintah  
I = pengeluaran investasi  
X = pengeluaran ekspor  
M = pengeluaran impor

### 2.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, Pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output per kapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan aspek jumlah penduduk, sedangkan jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian (*self generating*). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk atau apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak.

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi serta bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan. Dua pendekatan yang umumnya digunakan dalam analisis teori pertumbuhan adalah:

- 1) Teori klasik yang kemudian dikembangkan dengan teori neoklasik (terutama teori Solow-Swan) yang mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran agregat (*supply oriented*)
- 2) Teori Keynes yang juga disempurnakan oleh teori Harold-Domar, yang mengembangkan sisi permintaan agregat. Teori ini sering disebut pendekatan modern dalam makroekonomi

## III. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa tabel Input Output (tabel IO) selama 3 tahun yaitu tahun 2000, updating 2003, dan 2005, serta data perkembangan pertumbuhan PDB dan distribusi menurut sektor-sektor ekonomi dalam PDB tahun 2000 - 2009. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat

Statistik (BPS). Karena keterbatasan ketersediaan data tabel IO terakhir tahun 2005 maka analisis sektor-sektor unggulan dibatasi hingga tahun 2005.

### 3.2. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah berdasarkan tabel Input Output, yaitu dengan pendekatan daya penyebaran atau *forward linkage* dan derajat kepekaan atau *backward linkage*. Daya penyebaran dan derajat kepekaan digunakan untuk melihat keterkaitan antar sektor dan mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dalam perekonomian, serta kemampuannya dalam menggerakkan sektor riil.

#### 3.2.1 Daya Penyebaran dan Derajat Kepekaan

Salah satu keunggulan analisis menggunakan model I-O adalah untuk mengetahui seberapa jauh tingkat hubungan atau keterkaitan antar sektor produksi. Ada tingkat keterkaitan teknis antara unsur aktif (unsur yang menunjang kegiatan industri/ekonomi, seperti perusahaan, prasarana, pelabuhan dan pemusatan industri) yang merupakan generator untuk memulai sesuatu proses polarisasi teknis. Hubungan teknis ini dapat berupa hubungan ke depan (*forward linkage*) dan hubungan ke belakang (*backward linkage*). Besarnya keterkaitan ini juga bisa dilihat dari dua sisi, yaitu tingkat keterkaitan kedepan atau yang disebut daya penyebaran atau *forward linkage* dan tingkat keterkaitan kebelakang atau yang disebut derajat kepekaan atau *backward linkage*.

Dari daya penyebaran dan derajat kepekaan ini diturunkan pula indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan. Bahkan selama ini, banyak para ahli telah menggunakan kedua indeks tersebut untuk menganalisa dan menentukan sektor-sektor kunci (*key sectors*) yang akan digunakan dalam pengembangan ekonomi di suatu wilayah.

Sektor yang mempunyai daya penyebaran tinggi memberikan indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai keterkaitan ke depan atau daya dorong yang cukup kuat dibandingkan terhadap sektor lainnya. Sebaliknya sektor yang mempunyai derajat kepekaan tinggi berarti sektor tersebut mempunyai ketergantungan (kepekaan) yang tinggi terhadap sektor lain.

Adapun indeks daya penyebaran memberikan indikasi bahwa, sektor-sektor yang mempunyai indeks daya penyebaran yang lebih besar dari 1, berarti daya penyebaran sektor tersebut di atas rata-rata daya penyebaran secara keseluruhan. Pengertian yang sama juga berlaku untuk indeks derajat kepekaan. Sektor yang mempunyai indeks derajat kepekaan lebih dari satu, berarti derajat kepekaan sektor tersebut di atas derajat kepekaan rata-rata secara keseluruhan.

Berdasarkan indeks daya penyebaran (DP) dan indeks derajat kepekaan (DK) ini, sektor-sektor ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, sebagai berikut :

- 1) Kelompok I adalah sektor-sektor yang mempunyai indeks DP dan indeks DK relatif tinggi (di atas rata-rata);
- 2) Kelompok II adalah sektor-sektor yang mempunyai indeks DK tinggi (di atas rata-rata) tetapi indeks DP-nya rendah (di bawah rata-rata);
- 3) Kelompok III adalah sektor-sektor yang mempunyai indeks DP rendah dan indeks DK-nya rendah (di bawah rata-rata); dan
- 4) Kelompok IV adalah sektor-sektor yang mempunyai indeks DP tinggi (di atas rata-rata) tetapi indeks DK-nya rendah (di bawah rata-rata)

### 3.2.2 Daya Penyebaran

Pada tabel I-O hubungan antara output dan permintaan akhir dijabarkan sebagai  $\mathbf{X} = (\mathbf{I} - \mathbf{A}^d)^{-1} \mathbf{F}^d$ . Jika diuraikan dalam bentuk matriks, hubungan tersebut dapat dituliskan sebagai:

$$\begin{bmatrix} X \\ \vdots \\ X_i \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{ij} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & \dots & b_{ij} & \dots & b_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nj} & \dots & b_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1^d \\ \vdots \\ F_i^d \\ \vdots \\ F_n^d \end{bmatrix} \quad \dots (1)$$

dimana

- $b_{ij}$  = sel matriks kebalikan  $(\mathbf{I} - \mathbf{A}^d)^{-1}$  pada baris I dan kolom j
- $X_i$  = output sektor i
- $F_i^d$  = permintaan akhir sektor i
- $I_j$  = 1,2, ..., n

Pada persamaan (1) dapat dilihat bahwa perubahan terhadap 1 unit  $F_1^d$  akan menimbulkan dampak perubahan terhadap  $X_1$  sebesar  $b_{11}$ ; terhadap  $X_2$  sebesar  $b_{21}$ , dan seterusnya. Begitu juga perubahan 1 unit  $F_2^d$  menimbulkan dampak perubahan terhadap  $X_1$  sebesar  $b_{12}$ ; terhadap  $X_2$  sebesar  $b_{22}$ , dan seterusnya. Secara umum jumlah dampak akibat perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi adalah :

$$r_j = b_{1j} + b_{2j} + \dots + b_{nj} = \sum_i b_{ij} \quad \dots (2)$$

di mana

- $r_j$  = jumlah dampak akibat perubahan permintaan akhir sektor j terhadap output seluruh sektor ekonomi.

$b_{ij}$  = dampak yang terjadi terhadap output sektor  $i$  akibat perubahan permintaan akhir sektor  $j$ .

Jumlah dampak dalam persamaan (2) disebut juga sebagai jumlah daya penyebaran; dan besaran ini menunjukkan dampak dari permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah atau negara. Daya penyebaran merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah atau negara.

Berdasarkan persamaan (2) selanjutnya dapat dihitung rata-rata dampak yang ditimbulkan terhadap output masing-masing sektor akibat perubahan permintaan akhir suatu sektor:

$$Y_j = \left( \frac{r_j}{n} \right) = \left( \frac{1}{n} \right) \sum_i b_{ij} \quad \dots (3)$$

dimana

$Y_j$  = rata-rata dampak terhadap output masing-masing sektor akibat perubahan permintaan akhir sektor  $j$ .

Akan tetapi karena sifat permintaan akhir dari masing-masing sektor berbeda satu sama lain, maka persamaan (2) dan (3) bukan merupakan ukuran yang sah untuk membandingkan dampak yang terjadi pada setiap sektor. Untuk keperluan perbandingan, maka persamaan (3) harus dinormalkan (*normalized*), dengan cara membagi rata-rata dampak pada suatu sektor dengan rata-rata dampak seluruh sektor. Ukuran yang dihasilkan dari proses ini disebut indeks daya penyebaran yang di formulasikan sebagai :

$$\begin{aligned} \alpha_j &= \frac{\left( \frac{1}{n} \right) \sum_i b_{ij}}{\left( \frac{1}{n^2} \right) \sum_i \sum_j b_{ij}} \\ &= \frac{\sum_i b_{ij}}{\left( \frac{1}{n} \right) \sum_i \sum_j b_{ij}} \quad \dots (4) \end{aligned}$$

dimana  $\alpha_j$  adalah indeks daya penyebaran sektor  $j$  dan lebih dikenal sebagai daya penyebaran sektor  $j$ .

Besaran  $\alpha_j$  dapat mempunyai nilai sama dengan 1, lebih besar 1 atau lebih kecil dari 1. Bila  $\alpha_j = 1$ , berarti bahwa daya penyebaran sektor  $j$  sama dengan rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. Nilai  $\alpha_j > 1$  menunjukkan bahwa

daya penyebaran sektor j berada di atas rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi; dan sebaliknya jika  $\alpha_j < 1$  menunjukkan daya penyebaran sektor j lebih rendah. Dalam banyak analisis Tabel I-O,  $\alpha_j$  disebut juga sebagai tingkat dampak keterkaitan ke belakang (*backward linkages effect ratio*).

### 3.2.3 Derajat Kepekaan

Berdasarkan persamaan (1) dapat juga dilihat bahwa dampak yang terjadi terhadap output sektor 1 ( $X_1$ ) sebagai akibat perubahan satu unit  $F_1^d$  adalah  $b_{11}$ ; sebagai akibat perubahan 1 unit  $F_2^d$  sebesar  $b_{12}$  dan seterusnya. Dampak terhadap  $X_2$  sebagai akibat perubahan satu unit  $F_1^d$  sebesar  $b_{21}$ , sebagai akibat perubahan satu unit  $F_2^d$  sebesar  $b_{22}$  dan seterusnya. Sehingga jumlah dampak terhadap output suatu sektor i sebagai akibat perubahan permintaan akhir berbagai sektor dapat dituliskan dalam bentuk persamaan :

$$\begin{aligned} b_{11} + b_{12} \dots + b_{1j} + \dots + b_{1n} &= \sum b_{1j} \\ b_{i1} + b_{i2} + \dots + b_{ij} + \dots + b_{in} &= \sum b_{ij} \\ b_{n1} + b_{n2} + \dots + b_{nj} + \dots + b_{nn} &= \sum b_{nj} \end{aligned} \quad \dots (5)$$

atau dalam persamaan umum:

$$S_i = \sum_j b_{ij} \quad \dots (6)$$

dimana:

$S_i$  = jumlah dampak terhadap sektor i sebagai akibat perubahan seluruh sektor.

Nilai  $S_i$  pada persamaan (6) disebut juga sebagai jumlah derajat kepekaan, yaitu besaran yang menjelaskan dampak yang terjadi terhadap output suatu sektor sebagai akibat perubahan permintaan akhir pada masing-masing sektor perekonomian. Oleh karena besaran ini menjelaskan pembentukan output di suatu sektor yang dipengaruhi oleh permintaan akhir masing-masing sektor perekonomian, maka ukuran ini dapat dimanfaatkan untuk melihat keterkaitan ke depan (*forward linkages*).

Untuk keperluan perbandingan antar sektor dan logika yang serupa dengan pembahasan daya penyebaran, maka persamaan (6) dinormalkan menjadi :

$$\beta_i = \frac{\sum_j b_{ij}}{1} \dots (7)$$

$$\left( \frac{1}{N} \right) \sum_i \sum_j b_{ij}$$

dimana :

$\beta_i$  = indeks derajat kepekaan sektor  $i$  atau lebih sering sebagai derajat kepekaan saja.

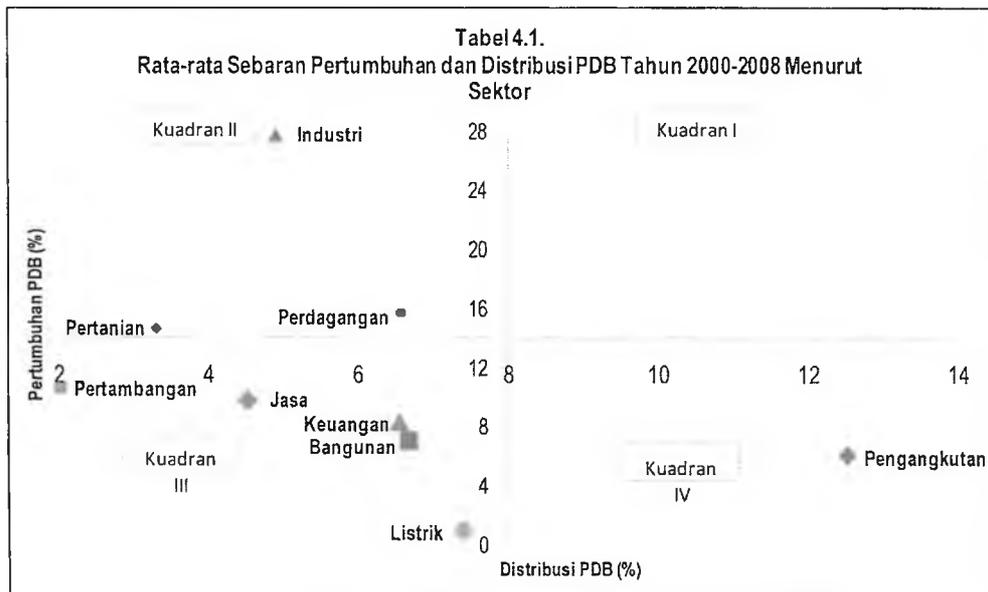
Nilai  $\beta_i > 1$  menunjukkan bahwa derajat kepekaan sektor  $i$  lebih tinggi dari rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor, sedangkan  $\beta_i < 1$  menunjukkan derajat sektor  $i$  lebih rendah dari rata-rata. Indeks derajat kepekaan ini disebut juga tingkat dampak keterkaitan ke depan (*forward linkages effect ratio*).

#### IV. HASIL ANALISIS

##### 4.1. Perkembangan Kinerja Sektor-sektor Perekonomian di Indonesia

###### 4.1.1. Rata-rata Perkembangan Kinerja Sektoral Tahun 2000 - 2008

Sejak tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang semakin membaik hingga mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2007 sebesar 6,3 persen. Pada tahun 2008 perekonomian Indonesia mengalami penurunan dan tumbuh sebesar 6,0 persen lebih lambat dibandingkan tahun 2007. Penurunan ini sebagai dampak dari terjadinya krisis *subprime mortgage* di AS yang memicu terjadinya krisis keuangan global dan mengakibatkan turunnya perekonomian global serta volume perdagangan dunia. Meskipun demikian, Indonesia termasuk negara yang mampu bertahan dari dampak krisis dan pertumbuhan ekonominya relatif tidak terpuruk terlalu jauh dibandingkan negara-negara lain.



Sumber : BPS, diolah

Dilihat dari sebaran pertumbuhan ekonomi dan distribusinya berdasarkan sektoral (lihat tabel 4.1), rata-rata tahun 2000 hingga 2008 sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor pertanian menempati posisi yang sama yaitu pertumbuhan PDB yang tidak terlalu tinggi tetapi distribusinya sangat tinggi. Berkebalikan dengan sektor pengangkutan dan komunikasi yang mempunyai pertumbuhan PDB tertinggi tetapi distribusinya relatif kecil. Rata-rata pertumbuhan PDB sektor industri mencapai 4,9 persen sedangkan distribusinya paling tinggi yaitu sebesar 27,8 persen. Sektor perdagangan menempati posisi kedua dengan rata-rata pertumbuhan PDB sebesar 5,6 persen dan distribusi 15,6 persen. Sektor pertanian dengan rata-rata pertumbuhan PDB sebesar 3,3 persen distribusinya mencapai 14,6 persen. Sementara itu, sektor pengangkutan dan komunikasi pertumbuhan PDB-nya paling tinggi yaitu mencapai 12,5 persen dan distribusinya 5,9 persen. Keenam sektor yang lain menempati posisi moderat yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor bangunan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor keuangan, serta sektor jasa.

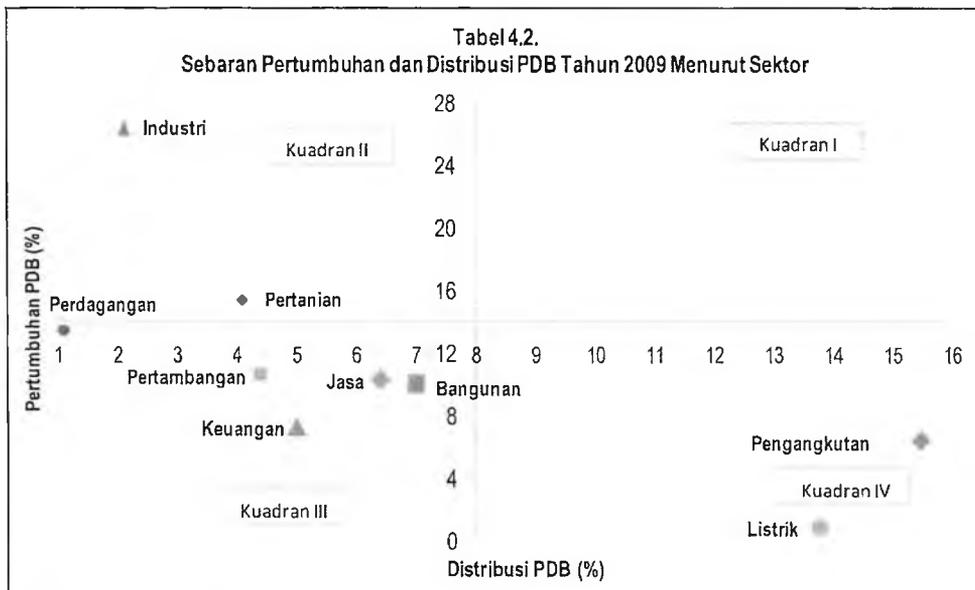
Sektor industri masih menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2008 akibat krisis global seiring dengan menurunnya kinerja perdagangan internasional. Sektor ini juga mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai didominasi oleh sektor yang lebih banyak berorientasi pada teknologi. Sektor pertanian juga memberikan peran yang tidak kalah pentingnya karena porsi sektor ini dalam distribusi PDB juga tinggi. Selain itu, sektor ini menggambarkan tipologi negara Indonesia sebagai negara agraris dan mempunyai banyak tenaga kerja terutama di sektor pertanian. Sektor perdagangan juga memberikan sinyal positif dalam pertumbuhan ekonomi terkait dengan masih kuatnya pertumbuhan konsumsi dan daya beli masyarakat Indonesia, meskipun sektor ini juga mengalami pertumbuhan penurunan akibat krisis global.

Sementara itu, sektor pengangkutan dan komunikasi yang menempati posisi pada kuadran keempat, menunjukkan kinerja yang konsisten dan cukup baik. Semakin baiknya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi baik darat, laut, dan udara menggambarkan prospek sektor pengangkutan dan komunikasi semakin menjanjikan. Selain itu, meningkatnya kebutuhan masyarakat atas fasilitas telekomunikasi juga ikut mendorong laju pertumbuhan sektor tersebut.

Di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian masih memperlihatkan kinerja yang kurang memuaskan. Berfluktuasinya harga minyak mentah dunia turut memperlambat kinerja sektor ini. Semakin tingginya harga minyak mentah dunia akan menaikkan juga beban penggunaan listrik, sehingga kecenderungan konsumsi masyarakat terhadap listrik akan menurun. Hal ini pada akhirnya akan berimbas pada menurunnya kinerja sektor listrik, gas, dan air bersih.

#### 4.1.2 Perkembangan Kinerja Sektor Tahun 2009

Pada tahun 2009, perkembangan kinerja sektoral sedikit mengalami perubahan posisi (lihat tabel 4.2). Sektor industri dan sektor pertanian tetap menempati posisi teratas dan menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun di tahun 2009 masih mengalami dampak lanjutan dari krisis global. Sedangkan sektor perdagangan mengalami penurunan pertumbuhan PDB sehingga berpindah ke kuadran ketiga, sama seperti sektor pertambangan, sektor bangunan, sektor keuangan dan sektor jasa. Sementara itu, sektor listrik juga mengalami perpindahan ke kuadran keempat bersama dengan sektor pengangkutan karena meningkatnya pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih.



Sumber : BPS, diolah

Pertumbuhan sektor industri mengalami perlambatan akibat menurunnya aktivitas perdagangan internasional dan melemahnya perekonomian global walaupun distribusinya terhadap PDB masih relatif tinggi. Dorongan sektor industri berasal dari industri makanan dan minuman terkait dengan penyelenggaraan kegiatan kampanye dan terselenggaranya Pemilu. Sektor pertanian mengalami peningkatan pertumbuhan dipicu oleh tanaman bahan makanan terutama dorongan peningkatan produksi padi dan palawija. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Penggunaan benih varietas tinggi dan penurunan tanaman padi yang terkena puso (banjir, kekeringan, hama tanaman) diperkirakan menjadi pendorong tingginya angka pertumbuhan sektor ini.

Sektor perdagangan mengalami penurunan pertumbuhan terkait dengan menurunnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan konsumsi masyarakat juga

menurun. Perbaikan permintaan global dan peningkatan harga barang tambang terutama non migas memacu kenaikan pertumbuhan sektor pertambangan dan galian. Program konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas, serta diversifikasi penggunaan energi ke gas yang dilakukan oleh PT. PLN mendorong permintaan akan listrik dan gas meningkat tajam. Selain itu, program pembangunan listrik 10 ribu MW yang telah menyelesaikan tahap pertama juga menjadi pemicu. Hal ini mendorong tingginya pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih. Sektor pengangkutan dan komunikasi tetap mampu tumbuh tertinggi dibandingkan sektor lain. Tingginya permintaan akan jasa angkutan khususnya pada musim liburan sekolah dan hari besar keagamaan, serta peningkatan permintaan jasa telekomunikasi menjadi pemicu meningkatnya pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi.

#### **4.2. Sektor-sektor Ekonomi Unggulan 2000 - 2005**

Perhatian pemerintah pada perkembangan sektor riil merupakan isu kebijakan yang kerap kali menjadi sorotan para ahli/pakar dan pengamat ekonomi. Kritik yang disampaikan adalah Pemerintah terlalu mengutamakan upaya pencapaian stabilitas ekonomi makro dalam pengelolaan kebijakan fiskal sehingga sektor riil semakin tertinggal. Prestasi mewujudkan stabilitas ekonomi dalam bentuk semakin terkendalinya nilai tukar rupiah, peningkatan pertumbuhan yang terus berlanjut, inflasi di bawah dua digit, dan indeks harga saham yang terus menguat, tidaklah punya arti kesejahteraan bila tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di masa pemerintahan sebelum orde reformasi, persoalan kesejahteraan masyarakat ditangani dengan kebijakan pengeluaran (*expenditure policy*) dalam bentuk pelaksanaan program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Kegiatan program ini antara lain adalah; perbaikan & pembangunan saluran irigasi, jalan, sarana pendidikan dan kesehatan di daerah pedesaan. Hal yang kurang lebih sama juga dilakukan di daerah pinggiran perkotaan. Disamping itu, pelaksanaan berbagai program subsidi untuk sektor pertanian seperti; subsidi pupuk, subsidi bunga Kredit Usahatani, dan berbagai jenis kredit lainnya yang berpadu dengan kebijakan harga dasar (seperti; harga dasar gabah) telah membuat kegiatan produksi pedesaan semakin menguat dan memperluas kesempatan kerja.

Zaman reformasi yang bergulir sejak 1998 hingga saat ini tidak lagi memberikan kesempatan yang demikian baik kepada pemerintah. Reformasi tata negara yang menyangkut independensi Bank Indonesia telah menutup kemungkinan berlanjutnya kredit-kredit program seperti waktu lalu. Pola kelembagaan baru perlu dibentuk dan dikembangkan agar kebutuhan akan adanya kredit program dapat dipenuhi.

Dari sisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), keterbatasan untuk melakukan kebijakan pengeluaran semacam itu setidaknya disebabkan oleh dua hal; (1) besarnya beban yang ditanggung untuk menyelamatkan sektor perbankan agar tidak ambruk akibat krisis tahun 1997, (2) penataan hubungan keuangan antara pusat – daerah sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, dan (3) perubahan paradigma peran APBN yang lebih mengutamakan fungsi stabilisasi dengan menjaga *sustainability* daripada sebagai stimulus perekonomian.

Beban APBN atas program penyelamatan perbankan atau yang lebih dikenal dengan rekapitalisasi perbankan mencapai sekitar Rp 40 triliun setiap tahunnya. Angka ini dapat meningkat bila inflasi tidak berhasil dikendalikan, karena sebagian dari bunga obligasi negara yang digunakan untuk melakukan rekapitalisasi tersebut bersifat *variable cost*.

Hubungan keuangan pusat – daerah yang mengikuti kebijakan otonomi daerah telah memberikan otonomi yang luas pada daerah untuk memutuskan penggunaan dana yang diterima dari pemerintah pusat. Pembagian kewenangan antara departemen – departemen teknis dengan pemda juga sedang dalam proses menemukan bentuk baru yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Kemampuan aparat daerah untuk merancang kebijakan, menyusun program pembangunan, merencanakan kegiatan dan melaksanakannya secara konsisten juga masih dalam proses pengembangan kemampuan (*capacity building*). Kondisi ini telah mempersempit ruang gerak kebijakan pengeluaran pemerintah pusat dalam mengatasi persoalan pengangguran.

Perubahan paradigma peran APBN sebagaimana disebutkan di atas mengandung arti bahwa kebijakan pengeluaran tidak lagi diarahkan untuk secara langsung menstimulasi perekonomian melalui angka pengganda anggaran pemerintah (*budget multiplier effect*). Belanja pemerintah lebih diarahkan dan diutamakan untuk membangun dan memperkuat aspek – aspek kelembagaan yang dibutuhkan bagi bekerjanya ekonomi pasar (*market mechanism*) secara efisien. Pemikiran dasarnya adalah dengan semakin baiknya kelembagaan yang mendukung transaksi dalam perekonomian Indonesia maka pasar akan bekerja lebih efisien sehingga volume perdagangan dan investasi meningkat. Selanjutnya hal itu diharapkan akan memacu pertumbuhan sektor riil.

Dengan memperhatikan hasil-hasil penataan kelembagaan (instansi dan regulasi) selama satu dasawarsa terakhir, keleluasaan kebijakan pengeluaran perlu dilihat kembali guna melakukan stimulus langsung ke sektor – sektor ekonomi. Tanpa mengabaikan keberadaan mekanisme kebijakan pengeluaran saat ini yang relatif lebih rumit dibandingkan waktu lalu, acuan tentang sektor-sektor yang merupakan prioritas untuk mendapat peningkatan anggaran dari budget negara masih tetap diperlukan dalam rangka mengatasi stagnasi sektor riil dan menurunkan pengangguran.

#### 4.2.1 Sektor – Sektor Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi

Identifikasi sektor unggulan dilakukan dengan menggunakan tiga indikator yaitu; *backward linkage*, *forward linkage*, dan gabungan kedua indikator terdahulu. Indikator – indikator tersebut diolah dari tabel Input – Output 66 sektor tahun 2000 – 2005.

*Backward linkage* (BL) merupakan indikator yang memberikan gambaran tentang keterkaitan suatu sektor ekonomi dengan sektor – sektor ekonomi lainnya dengan sumber keterkaitan berupa mekanisme penggunaan input produksi. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan permintaan akhir sektor tertentu akan meningkatkan penggunaan input dari berbagai sektor lain secara langsung. Sektor-sektor penyedia input tersebut juga akan meningkatkan penggunaannya. Memperhatikan karakteristik yang demikian, maka sektor – sektor yang memiliki angka BL tinggi dapat disebut sebagai **sektor unggulan penghela perekonomian** karena memiliki keterkaitan ke belakang yang kuat untuk menarik sektor – sektor ekonomi lainnya.

*Forward linkage* (FL) memberikan gambaran yang berbalikan dengan BL. Indikator ini memberikan penjelasan tentang keterkaitan ke depan, artinya menggambarkan dampak yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan output suatu sektor tertentu ke sektor – sektor lainnya. Peningkatan output tersebut akan didistribusikan lebih lanjut ke berbagai sektor ekonomi sehingga menimbulkan peningkatan penggunaannya di sektor-sektor tersebut. Mekanisme keterkaitan yang digambarkan bersumber dari penawaran/suplai output. Sektor dengan FL tinggi disebut sebagai **sektor unggulan pendorong perekonomian**, mengingat adanya keterkaitan kedepan yang kuat untuk mendorong penggunaan outputnya pada sektor – sektor ekonomi lainnya.

Hasil identifikasi sektor unggulan penghela perekonomian (BL) dapat dilihat pada tabel 4.3. Tampak pada tabel tersebut adanya perbedaan sektor ekonomi unggulan pada masing-masing tahun pengamatan. Pada tahun 2000, sektor unggulan penghela perekonomian didominasi oleh industri yang berorientasi pertanian (penanganan pasca panen dan agro industri ringan), yaitu industri penggilingan padi, industri pengolahan dan pengawetan makanan, industri minyak dan lemak, serta industri gula.

**Tabel 4.3.**  
**Analisis Perkembangan Sektor Unggulan Penghela Perekonomian Tahun 2000**

Peringkat	Sektor	BL
1	Industri penggilingan padi	1.33
2	Industri pengolahan dan pengawetan makanan	1.31
3	Industri minyak dan lemak	1.29
4	Industri gula	1.29
5	Pemotongan hewan	1.25
6	Restoran dan hotel	1.25
7	Unggas dan hasil-hasilnya	1.22
8	Industri bambu, kayu dan rotan	1.21
9	Industri makanan lainnya	1.20
10	Industri logam dasar bukan besi	1.20

Sumber : Tabel IO Tahun 2000, BPS, diolah

Tahun 2003 terjadi pergeseran komposisi dimana pada tahun ini sektor penghela perekonomian didominasi oleh industri berbahan baku mineral dan agro industri tingkat lanjut (lihat tabel 4.4). Industri berbahan baku mineral yaitu industri barang dari logam dan industri kimia, sedangkan agro industri lanjutan yaitu industri pupuk dan pestisida, industri barang karet dan plastik, serta industri tepung segala jenis. Pergeseran jenis sektor unggulan ini mengindikasikan adanya pendalaman industri (*industrial deepening*) dalam perekonomian Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya proses penguatan struktur industri nasional yang kelak akan meningkatkan perolehan nilai tambah bagi ekonomi nasional.

**Tabel 4.4.**  
**Analisis Perkembangan Sektor Unggulan Penghela Perekonomian Tahun 2003**

Peringkat	Sektor	BL
1	Industri barang dari logam	1.34
2	Industri kimia	1.33
3	Industri pupuk dan pestisida	1.33
4	Industri barang karet dan plastik	1.29
5	Industri tepung, segala jenis	1.28
6	Industri pengolahan dan pengawetan makanan	1.28
7	Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun	1.27
8	Industri gula	1.26
9	Industri penggilingan padi	1.24
10	Listrik, gas dan air bersih	1.24

Sumber : Tabel IO Tahun 2003, BPS, diolah

Sementara itu di tahun 2005 kembali terjadi perubahan sektor unggulan penghela perekonomian. Sektor unggulan tersebut didominasi oleh industri berorientasi pertanian seperti tahun 2000 (lihat tabel 4.5), yaitu industri minyak dan lemak, industri penggilingan padi, industri gula, serta industri pengolahan dan pengawetan makanan.

**Tabel 4.5.**  
**Analisis Perkembangan Sektor Unggulan Penghela Perekonomian Tahun 2005**

Peringkat	Sektor	BL
1	Industri minyak dan lemak	1.36
2	Industri penggilingan padi	1.31
3	Industri gula	1.29
4	Industri pengolahan dan pengawetan makanan	1.28
5	Angkutan kereta api	1.27
6	Industri makanan lainnya	1.27
7	Industri logam dasar bukan besi	1.26
8	Industri minuman	1.23
9	Industri tekstil, pakaian dan kulit	1.22
10	Restoran dan hotel	1.20

Sumber : Tabel IO Tahun 2005, BPS, diolah

Analisis lebih mendalam terhadap hasil indentifikasi sektor unggulan penghela perekonomian menunjukkan adanya tiga sektor ekonomi yang secara terus menerus muncul dalam urutan 10 besar, yakni;

- 1) Sektor Industri Penggilingan Padi (IPP),
- 2) Sektor Industri Pengolahan dan Pengawetan Makanan (IPPM), dan
- 3) Sektor Industri Gula (IG).

Sektor IPP mengalami perubahan kemampuan sebagai penghela perekonomian. Dimana angka BL tahun 2000 sebesar 1,33 kemudian mengalami penurunan tahun 2003 menjadi 1,24 dan kembali meningkat tahun 2005 menjadi 1,31. Hal ini menggambarkan bahwa industri ini mempunyai kemampuan untuk dikembangkan dan ditingkatkan sebagai salah satu sektor untuk menarik sektor-sektor ekonomi lainnya sebagai input sektor tersebut. Sektor IPPM menunjukkan adanya penurunan kemampuan sebagai penghela perekonomian. Angka BL-nya menurun dari 1.31 di tahun 2000 menjadi 1.28 pada tahun 2005. Kondisi ini menunjukkan industri IPPM kurang mampu menjadi penghela perekonomian. Sektor IG relatif stabil sebagai sektor unggulan penghela perekonomian dengan angka BL yang tetap di tahun 2000 dan 2005 yaitu sebesar 1,29.

Tabel 4.6 hingga tabel 4.8 menyajikan hasil identifikasi sektor unggulan pendorong perekonomian (FL) pada periode 2000-2005. Terdapat empat sektor unggulan pendorong yang senantiasa berada dalam urutan 10 besar, yakni;

- 1) Sektor Perdagangan,
- 2) Sektor Penambangan Batubara dan Bijih Logam,
- 3) Sektor Lembaga Keuangan, dan
- 4) Sektor Pengilangan Minyak Bumi.

**Tabel 4.6**  
**Analisis Perkembangan Sektor Unggulan Penghela Perekonomian**  
**Tahun 2000**

Peringkat	Sektor	FL
1	Perdagangan	4.38
2	Penambangan minyak, gas dan panas bumi	2.68
3	Penambangan batubara dan bijih logam	1.67
4	Lembaga keuangan	1.58
5	Industri makanan lainnya	1.48
6	Usaha bangunan dan jasa perusahaan	1.47
7	Bangunan	1.44
8	Pengilangan minyak bumi	1.42
9	Padi	1.36
10	Industri kimia	1.29

Sumber : Tabel 10 Tahun 2000, BPS, diolah

Diantara empat sektor diatas terdapat dua sektor yang menunjukkan penguatan kemampuannya sebagai pendorong ekonomi, yaitu; sektor lembaga Keuangan dan sektor Industri Pengilangan Minyak Bumi. Sementara dua sektor lainnya mengalami penurunan kemampuan sebagai pendorong perekonomian. Angka FL sektor lembaga keuangan meningkat dari 1.58 di tahun 2000 menjadi 2.0 pada tahun 2005. Pada sektor Industri Pengilangan Minyak Bumi bergerak naik dari 1.42 menjadi 2.1.

Telaah lebih jauh mengenai sektor unggulan menunjukkan adanya 6 (enam) sektor unggulan penghela dan sekaligus pendorong ekonomi ditahun 2000-2005. Sektor – sektor dimaksud meliputi;

- 1) Sektor Industri Kimia,
- 2) Sektor Industri Pupuk Pestisida,
- 3) Sektor Industri Makanan Lainnya,
- 4) Sektor Industri Barang Karet dan Pestisida,
- 5) Sektor Industri Tepung, segala jenis, dan
- 6) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

**Tabel 4.7**  
**Analisis Perkembangan Sektor Unggulan Penghela Perekonomian**  
**Tahun 2003**

Peringkat	Sektor	FL
1	Perdagangan	3.68
2	Penambangan batubara dan bijih logam	2.44
3	Industri kimia	2.43
4	Jasa lainnya	1.82
5	Industri pupuk dan pestisida	1.54
6	Lembaga keuangan	1.50
7	Padi	1.48
8	Industri barang karet dan plastik	1.46
9	Industri tepung, segala jenis	1.30
10	Pengilangan minyak bumi	1.29

Sumber : Tabel IO Tahun 2003, BPS, diolah

**Tabel 4.8**  
**Analisis Perkembangan Sektor Unggulan Penghela Perekonomian**  
**Tahun 2005**

Peringkat	Sektor	FL
1	Perdagangan	2.70
2	Penambangan minyak, gas dan panas bumi	2.39
3	Pengilangan minyak bumi	2.10
4	Lembaga keuangan	2.00
5	Jasa lainnya	1.53
6	Industri pupuk dan pestisida	1.51
7	Penambangan batubara dan bijih logam	1.46
8	Listrik, gas dan air bersih	1.45
9	Usaha bangunan dan jasa perusahaan	1.40
10	Bangunan	1.37

Sumber : Tabel IO Tahun 2000, BPS, diolah

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai bila pengembangan (penciptaan nilai tambah) di enam sektor tersebut dapat dioptimalkan. Bentuk pengembangannya dapat melalui efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas. Kedua hal tersebut dapat dikontribusikan oleh para pelaku usaha dibidang - bidang tersebut dan juga oleh pemerintah, baik melalui penyesuaian regulasi maupun investasi publik.

Keenam sektor tersebut merupakan sektor yang perlu mendapat prioritas utama dalam kebijakan pengeluaran (*expenditure policy*). Baik melalui mata anggaran belanja modal, perimbangan keuangan (pusat - daerah), maupun belanja pegawai. Anggaran untuk sektor prioritas utama ini perlu disalurkan kearah

peningkatan produktivitas melalui pengembangan teknologi dan adopsinya serta diversifikasi produk.

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Peningkatan stabilitas ekonomi melalui penguatan nilai tukar rupiah, peningkatan pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga (inflasi di bawah dua digit), dan indeks harga saham yang terus menguat, tidaklah punya arti kesejahteraan bila tidak diikuti dengan peningkatan daya beli dan pengurangan pengangguran.
- 2) Persoalan pengangguran ditangani dengan kebijakan pengeluaran (*expenditure policy*) dalam bentuk pelaksanaan program-program padat karya, antara lain : perbaikan & pembangunan saluran irigasi, jalan, sarana pendidikan dan kesehatan di daerah pedesaan.
- 3) Terjadi pergeseran jenis sektor penggerak utama perekonomian yang mengindikasikan adanya pendalaman industri (*industrial deepening*) dalam perekonomian Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya proses penguatan struktur industri nasional yang kelak akan meningkatkan perolehan nilai tambah bagi ekonomi nasional meskipun saat ini kontribusinya masih rendah dalam PDB
- 4) Industri yang selalu menjadi penghela perekonomian selama tahun 2000-2005, yaitu sektor Industri Penggilingan Padi (IPP), sektor Industri Pengolahan dan Pengawetan Makanan (IPPM), dan sektor Industri Gula (IG).
- 5) Industri yang selalu menjadi pendorong perekonomian selama tahun 2000-2005, yaitu : Sektor Perdagangan, Sektor Penambangan Batubara dan Bijih Logam, Sektor Lembaga Keuangan, dan Sektor Pengilangan Minyak Bumi.
- 6) Enam sektor unggulan penghela dan sekaligus pendorong ekonomi ditahun 2000-2005 meliputi : Sektor Industri Kimia, Sektor Industri Pupuk Pestisida, Sektor Industri Makanan Lainnya, Sektor Industri Barang Karet dan Pestisida, Sektor Industri Tepung, segala jenis, dan Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

### 5.2. Saran

- 1) Untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi maka pengembangan (penciptaan nilai tambah) sektor-sektor yang menjadi unggulan sebagai penghela dan pendorong perekonomian harus dioptimalkan.
- 2) Kebijakan di sektor riil harus diarahkan pada sektor-sektor unggulan tersebut sehingga sektor-sektor tersebut mampu meningkatkan kinerjanya. Kebijakan

antara lain dalam bentuk perbaikan iklim investasi, insentif fiskal, dan infrastruktur.

- 3) Dalam pembahasan anggaran dengan Kementerian/Lembaga terkait, harus dilakukan skala prioritas yang mengacu pada sektor-sektor unggulan, misalnya mengenai bagaimana program dan kegiatan yang diajukan diarahkan pada sektor-sektor tersebut.
- 4) Karena keterbatasan data yang digunakan, seperti telah disebutkan dalam metodologi penelitian, untuk mempertajam analisis maka sebaiknya dilakukan updating data menggunakan tabel Input-Output tahun 2010 yang saat ini sedang dikerjakan oleh BPS sehingga hasil analisis bisa lebih relevan sebagai rekomendasi pada penyusunan APBN tahun 2010-2011.

### Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, 2000. *"Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input-Output"*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2000. *"Tabel Input-Output Indonesia"*, 1971, 1975, 1980, 1990, 2000, Jakarta
- CEIC, database ekonomi yang tersedia di PKEM BKF Departemen Keuangan.
- Denburg Thomas F dan Karyaman Muchtar, 1994. *"Makro Ekonomi"*
- Dernburg, Thomas F, 1994. *"Konsep, Teori dan Kebijakan Makro Ekonomi"*, Erlangga, Jakarta
- Hera Susanti, Moh. Ihsan, Widyati, *"Indikator-Indikator Makroekonomi"*, Lembaga Penerbit FE-UI dan LPEM FE-UI, Jakarta
- Purbaya Yudhi Sadewa & Damhuri Nasution, Referensi.
- Sukirno Sadono, 1986. *"Dasar-dasar Teori Ekonomi Makro"*
- Sukirno, Sudono, 1996. *"Pengantar Teori Makro Ekonomi"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Todaro Michael, 1994. *"Economic Development"*
- Tri Widodo W Utomo, *"Transformasi Struktural Perekonomian Indonesia Tahun 2020: Permasalahan dan Tantangan"*, 2004.
- Sukirno, Sadono, *"Dasar-dasar Teori Ekonomi Makro"*, 1987